

# ***ASSET BASED COMMUNITY DEVELOPMENT UNTUK MEMBANGKITKAN UMKM DI LINGKUP DESA YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19***

**Zefanya Christie**  
*Universitas Indonesia*  
[zefanyachristie@ui.ac.id](mailto:zefanyachristie@ui.ac.id)

**Sylvi Sabrina**  
*Universitas Indonesia*  
[zefanyachristie@ui.ac.id](mailto:zefanyachristie@ui.ac.id)

**Annisa Altis**  
*Universitas Indonesia*  
[zefanyachristie@ui.ac.id](mailto:zefanyachristie@ui.ac.id)

**Abstract:** Every citizen has actually been attached to various rights to himself since birth which are guaranteed and protected by the state. One of the rights of these citizens is economic rights and welfare. The outbreak of the COVID-19 pandemic has affected various aspects of life, one of which is the economic aspect. It takes efforts from various parties, both the government and society, so that the wheels of the Indonesian economy can continue. The existence of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the community plays an important role in helping the country's economic cycle. This important role is in the form of creating jobs and increasing the Gross Domestic Product (GDP). Therefore, a national economic recovery strategy is needed, especially for MSME players in an applicable and appropriate manner. In this case, the author proposes an asset-based community development program aimed at MSMEs in rural areas. The Asset Based Community Development method aims to explore the potential of available assets and how communities can contribute to realizing a sustainable economic ecosystem. Furthermore, the author will review further the position of MSMEs, the realization of Asset-Based Community Development in other countries, as well as the form of Asset-Based Community Development in reviving MSMEs, especially in rural areas such as stalls affected by the COVID-19 pandemic. This research was conducted using a juridical-empirical method that enforces legal policies according to the conditions of society. As a result, Asset Based Community Development can be used as a post-COVID-19 economic recovery program.

**Keywords:** *Asset Based Community Development, MSME, Economy, Village Scope, Covid-19*

**Abstrak:** Setiap warga negara sejatinya telah dilekati berbagai hak pada dirinya sendiri sejak lahir yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Salah satu hak dari warga negara tersebut adalah hak ekonomi dan kesejahteraan. Merebaknya pandemi COVID-19 berimbas terhadap berbagai aspek kehidupan, salah satunya ialah aspek

perekonomian. Dibutuhkan usaha dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat agar perputaran roda ekonomi Indonesia terus berjalan. Eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di lingkungan masyarakat berperan penting dalam membantu perputaran ekonomi negara. Peranan penting tersebut berupa menciptakan lapangan kerja hingga meningkatkan Product Domestic Bruto (PDB). Oleh karena itu, diperlukan strategi pemulihan perekonomian nasional khususnya untuk para pelaku UMKM secara aplikatif dan tepat. Pada hal ini, penulis mengajukan program pemberdayaan masyarakat berbasis aset (*Asset Based Community Development*) yang ditujukan pada UMKM di lingkungan desa. Metode *Asset Based Community Development* ini bertujuan untuk menggali potensi aset yang tersedia dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi untuk mewujudkan ekosistem perekonomian yang berkelanjutan. Selanjutnya, penulis akan meninjau lebih jauh mengenai kedudukan UMKM, perwujudan *Asset Based Community Development* di negara lain, serta bentuk *Asset Based Community Development* dalam membangkitkan UMKM terutama di lingkungan desa seperti warung yang terdampak pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris yang memberlakukan kebijakan hukum sesuai dengan kondisi masyarakat. Alhasil, *Asset Based Community Development* dapat digunakan sebagai program pemulihan perekonomian pasca COVID-19.

**Kata Kunci:** *Asset Based Community Development, UMKM, Perekonomian, Lingkup Desa, Covid-19*

## **Pendahuluan**

Negara Indonesia memiliki landasan konstitusi yang mendasari berdirinya sebuah negara. Dalam konstitusi tersebut, tercantum tujuan dan cita-cita negara untuk merdeka, bersatu, dan berdaulat antarwarga negara. Hal ini dipertegas dengan diakuinya kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Indonesia sebagai negara hukum menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan memengaruhi bentuk lainnya apabila ada yang terabaikan. HAM memiliki prinsip saling bergantung, jika salah satu bentuk terabaikan maka bentuk lainnya akan bergesekan sehingga hak rakyat tidak terpenuhi.<sup>2</sup> Selanjutnya, prinsip universal berarti setiap individu mendapatkan hak

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1*, n.d.

<sup>2</sup> Wahyono, "Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia," ham.go.id, 2016, dalam <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>, diakses 30 November 2021.

yang sama dan bersifat umum.<sup>3</sup> Pada prinsip kesetaraan, adanya pengakuan bahwa seluruh manusia sederajat sehingga tidak boleh ada peristiwa diskriminasi suatu kalangan baik berdasarkan ras, etnis, gender, maupun status sosialnya.<sup>4</sup>

Negara memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi seluruh hak warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28C yang mengandung hak untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhan dasarnya melalui kegiatan perekonomian.<sup>5</sup> Konstitusi juga menjamin hak untuk bekerja dan memiliki kehidupan yang layak dalam Pasal 27 ayat (2).<sup>6</sup> Selain itu, hal ini juga tertuang dalam International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap negara melakukan seluruh upaya agar hak-hak yang dimiliki setiap warganya terutama hak ekonomi terpenuhi.<sup>7</sup> Akan tetapi, merebaknya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia mempengaruhi aspek sosial-ekonomi sehingga dapat mengancam hak ekonomi warga negara yang dijamin dalam Pasal 28C dan Pasal 27 ayat (2). Dampak ini dapat dilihat berdasarkan data hasil survei Katadata Insight Center (KIC), sebanyak 82,9% UMKM mengalami imbas negatif pandemi dan hanya sebagian kecil (5,9%) UMKM yang berdampak sebaliknya.<sup>8</sup> Mengacu pada data tersebut, berbagai usaha dilakukan oleh para pelaku usaha, salah satunya adalah

---

<sup>3</sup> Riska Carolina, "Hak Asasi Manusia: Sejarah Dan Prinsip," [eslam.or.id](https://eslam.or.id), 2019, dalam <https://asasi.elsam.or.id/hak-asasi-manusia-sejarah-dan-prinsip/>, diakses 30 November 2021.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C*, n.d.

<sup>6</sup> Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)*, n.d.

<sup>7</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR 993*, 1996, hlm. 2, Pasal 2 ayat (1).

<sup>8</sup> Kata Data Insight Center, "Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi COVID19," [katadata.go.id](https://katadata.co.id/umkm), 2020, dalam <https://katadata.co.id/umkm>, diakses 27 Februari 2022.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal ataupun pemberian gaji yang terhambat.<sup>9</sup> Saat ini perekonomian Indonesia memasuki masa resesi yang akan menimbulkan berbagai efek berkelanjutan dan berbagai pengaruh besar pada bidang lainnya seperti kesehatan, pendidikan, ataupun sosial.<sup>10</sup> Pengaruh besar terhadap ekonomi tersebut dibuktikan dengan data pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan IV - 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) menunjukkan kontraksi -2,07 yang di tahun sebelumnya, 2019, menyentuh angka 5,02.<sup>11</sup> Dengan demikian, diperlukan pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah dan dengan bantuan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Setelah meninjau lebih jauh, kedudukan UMKM dalam perekonomian negara Indonesia menempati posisi penting dan esensial yang disebabkan oleh jumlah UMKM berlimpah serta partisipasi nyata UMKM yang dominan pada PDB<sup>12</sup> senilai 61,07% atau 8.573,89 Triliun Rupiah.<sup>13</sup> Selain itu, UMKM juga membuka banyak peluang lapangan kerja sehingga dapat menyerap

---

<sup>9</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, “Survei Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia,” *Lipi.Go.Id*, 2020, dalam <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>10</sup> Lenti Iswari and Muharir, “Pengaruh COVID19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *JIMESHA: Jurnal Ilmu Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021): 14.

<sup>11</sup> BPS, “Profil Kemiskinan Di Indonesia Desember 2021,” *Berita Resmi Statistik*, 2021. [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210205095341.pdf), diakses 16 Februari 2022.

<sup>12</sup> Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Vrawati, “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa,” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019), 138.

<sup>13</sup> KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA, “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia,” *Ekon.Go.Id*, 2021, dalam <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses 21 Februari 2022.

tenaga kerja yang ada.<sup>14</sup> Oleh sebab itu, UMKM merupakan fondasi terpenting bagi perekonomian negara.

UMKM sudah dijamin oleh berbagai peraturan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang di dalamnya mengatur terkait prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria UMKM, usaha pemerintah dalam mengembangkan lingkungan UMKM, kemitraan, koordinasi UMKM, dan sebagainya.<sup>15</sup> Nyatanya, keberadaan UMKM masih belum terakomodir di tengah pandemi COVID-19 seperti adanya permasalahan dalam penurunan angka penjualan, sulitnya pendistribusian barang, kelangkaan bahan baku, dan sebagainya.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, posisi UMKM berperan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga membutuhkan penanganan dan bantuan yang cepat dan tepat dari pemerintah.

Pandemi COVID-19 berpengaruh pada sektor UMKM yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan dan bantuan yang cepat dan tepat dari pemerintah. Seperti, berbagai macam peraturan dibuat dengan harapan dapat mempermudah kehadiran UMKM serta menumbuhkan semangat wirausaha di tengah masyarakat terutama pada kondisi pandemi sehingga UMKM tersebut dapat semakin berkembang dan nantinya akan berpengaruh kepada perekonomian negara.

### **Eksistensi Pemberdayaan UMKM dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Jim Ife menuturkan bahwa pemberdayaan adalah pemberian sumber daya, kesempatan, pengetahuan, atau keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Indonesia, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 2 – 38.*, n.d.

<sup>16</sup> Anava Salsa Nur Savitri et al., “Dampak Dan Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Dan Era New Normal,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 7 (2020), 1434-1435.

kapabilitas diri untuk masa depan, dan berpartisipasi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang berada dalam lingkup kemiskinan dan sarana untuk menegakkan demokrasi ekonomi.<sup>18</sup> Terjadinya pemberdayaan masyarakat sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi maupun sosial.<sup>19</sup>

Sila kelima menyatakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk memperoleh keadilan sosial yang merata.<sup>20</sup> Oleh sebab itu, diperlukan peranan penting pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya demi kehidupan yang lebih baik dan terjamin salah satunya dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan umumnya ditujukan oleh pelaku ekonomi lemah agar kemampuan wirausahanya meningkat<sup>21</sup> dan dimulai dengan tahap persiapan sekaligus pengenalan agar terjalin kerja sama.<sup>22</sup>

Kehadiran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM sangat dibutuhkan untuk memberikan modal bagi para pelaku UMKM mengembangkan usahanya menjadi lebih visioner dengan pendekatan modern kepada calon konsumen.<sup>23</sup> Selain itu, pemerintah juga dapat membantu dalam proses

---

<sup>17</sup> Jim Ife, *Community Development in An Uncertain World* (Sydney: Cambridge University Press, 2013), 66.

<sup>18</sup> Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011): 89.

<sup>19</sup> Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Kritik* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 59.

<sup>20</sup> Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, and Imam Hanafi, "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)," *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 4 (2013): 13.

<sup>23</sup> Supriyanto, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 3, no. 1 (2006): 11–12.

administrasi perpajakan, pendampingan hukum bagi UMKM yang membutuhkan, serta membuka bimbingan mengenai pembukuan dan catatan keuangan UMKM.<sup>24</sup> Apabila UMKM diberdayakan secara optimal, maka akan berbanding lurus dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang dinilai dari perhitungan output per orang.<sup>25</sup> Sebelum adanya langkah pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yaitu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), terdapat enam program strategis UMKM, yakni perluasan akses dan pembangunan infrastruktur untuk UMKM; kemudahan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), dana ventura, mekaar, dan Ultra Mikro (UMi); penyederhanaan perizinan berusaha; mendorong pelaku UMKM untuk menggunakan permesinan modern; eskalasi teknologi; terintegrasi serta berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (KemenKopUKM RI).<sup>26</sup> Selain itu, terdapat juga program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diselenggarakan pada kepemimpinan Presiden Jokowi.<sup>27</sup>

Semenjak pandemi COVID-19, permasalahan mengenai UMKM semakin kompleks dengan adanya pengurangan budaya konsumerisme serta adanya pembatasan yang beberapa kali

---

<sup>24</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “Ini Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM,” [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id), 2021, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sederet-upaya-pemerintahmemajukan-umkm/>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>25</sup> Pradnya Paramita Hapsari, Abdul Hakim, and Saleh Socaidy, “Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu),” *Wacana* 17, no. 2 (2014): 95.

<sup>26</sup> Budi Nugraha, “Enam Program Strategis Umkm Segera Diimplementasikan,” *Suaramerdeka.Com*, 2019, dalam <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-04119115/enam-program-strategis-umkm-segera-diimplementasikan>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>27</sup> Kemenkeu RI, “Banpres Produktif Resmi Diluncurkan Untuk Pelaku Usaha Mikro,” [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id), 2020, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/banpresproduktif-resmi-diluncurkan-untuk-pelaku-usaha-mikro>, diakses 21 Februari 2022.

dilakukan.<sup>28</sup> Sebagai dampak nyata, riset Direktorat Jenderal Pajak (per 30 Juli 2020) membuktikan sebanyak 88% pelaku UMKM mengalami penurunan dalam penjualan.<sup>29</sup> Selain itu, menurut data dari United Nations Development Programme (UNDP) dan Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, disebutkan bahwa terdapat sembilan dari sepuluh UMKM mengalami penurunan permintaan dari pembeli sejak pandemi serta kesulitan dalam mendapatkan bahan baku dan distribusi produknya ke tangan konsumen.<sup>30</sup> Apabila pembelian konsumen mengalami penurunan, maka pelaku usaha melakukan PHK karyawannya demi menyelamatkan bisnisnya. Dengan demikian, diperlukan usaha untuk mengatasi dan mencegah hal yang akan merugikan pelaku usaha. Untuk mengatasi hal tersebut PEN lahir sebagai media pembangkit perekonomian. Bentuk nyata dari komitmen ini adalah program PEN yang sudah dilakukan sejak tahun 2020 dengan mempersiapkan anggaran 695,2 Triliun di tahun 2020 dan meningkat di tahun 2021.<sup>31</sup> PEN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan COVID – 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang

---

<sup>28</sup> Kementerian Investasi, “Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia,” [bkpm.go.id](https://www.bkpm.go.id), 2022, dalam <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upayapemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>29</sup> Marwanto Harjowiryono and Windraty Ariane Siallagan, “Studi Kasus Intervensi Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi COVID-19,” *Indonesian Treasury Review* 6, no. 3 (2021): 264.

<sup>30</sup> LPEM FEB UI and UNDP Indonesia, *Report Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia* (Jakarta: LPEM FEB UI dan UNDP Indonesia, 2020), 21–22.

<sup>31</sup> Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Program PEN Untuk Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional,” *Ekon.Go.Id*, 2021, dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonominasional>, diakses 21 Februari 2022.

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional yang kemudian diganti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020.

PEN bertujuan untuk membantu UMKM dalam menjalankan dan meningkatkan performa bisnisnya sehingga terus meningkatkan perekonomian Indonesia.<sup>32</sup> Adanya program PEN membantu membangkitkan UMKM selama pandemi.<sup>33</sup> Hal ini disebabkan oleh titik fokus utama program PEN, yaitu di bidang perekonomian seperti penjaminan Kredit Modal Kita (KMK), fasilitas pinjaman daerah dan program padat karya agar tenaga kerja semakin mumpuni, serta insentif usaha seperti tidak diberlakukannya kembali Pajak Penghasilan (PPh) 22 Impor.<sup>34</sup> Data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menunjukkan selama berjalannya program PEN yang berfokus pada UMKM, para pelaku UMKM menggunakan dana yang diberikan untuk membeli bahan baku, melunasi atau membeli alat produksi, kebutuhan konsumsi, bahkan membayar hutang kegiatan usaha.<sup>35</sup> Hal ini tentunya akan berdampak pada kenaikan omzet penjualan sehingga kondisi perekonomian semakin membaik.<sup>36</sup>

Tidak hanya omzet yang semakin naik, program PEN juga memudahkan UMKM untuk mendistribusikan dana BPUM

---

<sup>32</sup> Kemenkeu RI, "Program Pemulihan Ekonomi Nasional," [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonominasional), 2020, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonominasional>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>33</sup> Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional, "Program PEN Bangkitkan Geliat UMKM Di Masa Pandemi," *Covid19.Go.Id*, 2021, dalam <https://covid19.go.id/berita/program-penbangkitkan-geliat-umkm-di-masapandemi>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>34</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *APBN KITA: Kinerja Dan Fakta* (Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022), 24.

<sup>35</sup> Teguh Iman Harry Tjahyadi, *Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk UMKM Di PNM Mekar* (Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, 2021), 33.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 35.

secara merata serta kurangnya sumber daya manusia yang berujung pada alur birokrasi yang rumit.<sup>37</sup> Akan tetapi, selama berlangsungnya PEN, dana yang ada dibagi ke beberapa sektor dalam membantu pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sehingga memudahkan pelaku UMKM untuk ikut tumbuh dengan mendapatkan bahan baku dan mendistribusikan produknya.<sup>38</sup> Ditambah, adanya pembangunan infrastruktur yang akan berpengaruh pada digitalisasi UMKM seperti pendirian menara Base Transceiver Station (BTS), perluasan wilayah 4G atau 5G, hadirnya beberapa pusat data nasional, pendidikan dan latihan untuk Digital Technopreneur dan Digital Talent yang akan membantu mensukseskan program PEN.<sup>39</sup> Di sisi lain, keefektifan berjalannya program PEN sering dipertanyakan. Pada dasarnya, beberapa kali permasalahan bersumber dari tidak lengkapnya data UMKM yang ada sehingga berdampak pada ketidaktepatan sasaran alokasi dana PEN dan realisasi dana PEN yang terlambat.<sup>40</sup> Oleh sebab itu, diperlukan berbagai program yang dapat membantu UMKM untuk terus berkembang agar membantu perekonomian negara dan secara tidak langsung memperbaiki taraf kehidupan dan

---

<sup>37</sup> Muhammad Abubaka and Rusydi Abubakar, “Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020,” *Jurnal Transparansi Publik* 1, no. 1 (2021): 18.

<sup>38</sup> Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, “Program PEN Sektor Infrastruktur Scrap 1,2 Juta Tenaga Kerja Hingga Pelosok Desa,” *Covid19.Go.Id*, 2021, dalam <https://covid19.go.id/p/pemulihan-ekonomi-nasional/program-pen-sektor-infrastruktur-scrap-12-juta-tenaga-kerja-hingga-pelosok-desa>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>39</sup> Kemenko Perekonomian, “Optimalisasi Produktivitas UMKM Melalui Go-Digital Dan Go-Legal,” *Ekon.Go.Id*, 2021, dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3016/optimalisasi-produktivitas-umkm-melalui-go-digital-dan-go-legal>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>40</sup> Kemenkeu RI, “Keefektifitasan Program PEN Masih Diragukan, Apa Solusinya?,” *Kemenkeu.Go.Id*, 2020, dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/data-publikasi/artikel/2932-tes.html>, diakses 21 Februari 2022.

kesejahteraan karyawan. Selain itu, UMKM turut berkontribusi dan berperan besar terhadap PDB negara dan penyerapan tenaga kerja. Banyaknya tenaga kerja yang diserap dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 yang menyatakan dari 140,15 juta orang angkatan kerja terdapat 131,05 juta diantaranya sudah bekerja.<sup>41</sup> Didukung dengan data dari KemenKopUKM RI yang turut menyatakan kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja telah mencapai 97%. Oleh karena itu, segala pemberdayaan UMKM baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya sangat dibutuhkan karena dampaknya bersifat jangka panjang dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu cara pemberdayaan UMKM yang memiliki dampak berkepanjangan adalah melakukan community development, terutama Asset Based Community Development, yang berfokus pada peningkatan kemampuan pelaku usaha terhadap aset yang sudah dimiliki.

### **Teori Community Development dan Asset Based Community Development serta Penerapannya di Negara Lain.**

Perlu ada program yang mampu membangkitkan perekonomian Indonesia terutama bagi UMKM. Terdapat upaya yang ideal untuk diterapkan, yakni dengan mengembangkan kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, yaitu community development atau disebut juga pengembangan masyarakat.<sup>42</sup> Program ini menekankan pada pendekatan sosial-profesional, dengan memfasilitasi warga, terkhususnya warga lapisan bawah dengan menyiapkan anggotanya agar cakap dalam berbagai bidang pekerjaan. Keberpihakan terhadap masyarakat lapisan

---

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik, *Berita Resmi Statistik: Kadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), 3.

<sup>42</sup> Simon J V Silaen, "Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan" (Medan, 2016).

bawah memberikan kebebasan dengan mengubah kontrol sosial menjadi metode praktek melalui program-program yang bersifat kolaboratif-partisipatoris.<sup>43</sup> Dalam program ini, masyarakat memiliki andil untuk memilih tanggung jawab yang akan diambil untuk memenuhi kebutuhannya.

Asset Based Community Development (ABCD) merupakan strategi pengembangan berkelanjutan terhadap perekonomian individu, asosiasi, hingga institusi secara bersama-sama melalui pemberian perhatian khusus terhadap aset yang dimiliki sehingga metode ini cocok diterapkan bagi masyarakat Indonesia.<sup>44</sup> Adapun aset yang dimaksud dapat berupa kekayaan harta benda, kekayaan sumber daya alam, atau kekayaan sumber daya manusia seperti kecerdasan, kemampuan fisik, kepedulian, gotong royong, dan lainlain. Green dan Ilaines turut berpendapat bahwa dibutuhkan lima modal dalam proses pengembangan usaha, yakni modal fisik, modal finansial, modal sosial, modal lingkungan, serta modal manusia.<sup>45</sup> ABCD sendiri memiliki empat kriteria, yaitu Problem Based Approach, Asset Based Approach, Need Based Approach, dan Right Based Approach.<sup>46</sup> Problem Based Approach adalah upaya pengembangan masyarakat dengan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi, kemudian berusaha menyelesaikan masalah tersebut. Untuk Asset Based Approach, pengembangan dilakukan menggunakan kekayaan sumber daya. Kemudian, pendekatan berbasis kebutuhan (Need Based Approach) yang sering dikenal sebagai pendekatan tradisional, berfokus terhadap kebutuhan

---

<sup>43</sup> Zubacdi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Kritik*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013): 6.

<sup>44</sup> Mirza Maulana, "Asset Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat Di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang," *Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019): 260.

<sup>45</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012): 238.

<sup>46</sup> Ibid.

masyarakat.<sup>47</sup> Terakhir, Right Based Approach merupakan proses pengembangan masyarakat dengan pemberian modal terhadap individu, asosiasi, maupun lembaga. Keempat kriteria diatas mampu memudahkan proses pemberdayaan karena diiringi rasa kekeluargaan serta solidaritas yang mampu mengembangkan kepekaan, kecerdasan, dan kemampuan masyarakat. Pada dasarnya, ABCD memiliki sedikit perbedaan dengan Community Development sebab ABCD lebih berfokus terhadap pemanfaatan dan pengembangan masyarakat dengan menggunakan aset yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Sedangkan, Community Development lebih mengarah kepada kegiatan pengembangan yang bersifat umum dimana masyarakat hanya menerima pelatihan yang bersifat membangun tanpa mengulik potensi aset secara komprehensif.

Pengembangan masyarakat berbasis ABCD pernah dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Masyarakat Dewan Perwakilan Daerah Northumberland, Inggris. Pengembangan yang menggunakan metode berbasis aset ini dilakukan terhadap masyarakat lokal dengan tujuan peningkatan kesehatan serta penyamarataan kondisi kesehatan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh masyarakat Northumberland memiliki keterbatasan dalam mengakses pelayanan kesehatan serta minim edukasi. Pada kesempatan ini, tim kesehatan melibatkan masyarakat dengan menerapkan sistem kolaboratif.<sup>48</sup> Oleh karena itu, Tim Kesehatan Masyarakat DPD Northumberland dapat menganalisis permasalahan serta kebutuhan masyarakat setempat kemudian membuat strategi untuk menanggulungnya.

---

<sup>47</sup> International Association for Community Development (IACD), "What Are Asset-Based Approaches to Community Development?," [ubc.ca](https://csl.ubc.ca/files/2010/04/What-Are-Asset-Based-Approaches-toCommunity-Development), 2021, dalam <https://csl.ubc.ca/files/2010/04/What-Are-Asset-Based-Approaches-toCommunity-Development>, diakses 21 Februari 2022.

<sup>48</sup> Government Uk, "Asset-Based Community Development in Northumberland," *Www.Gov.Uk*, 2018, dalam <https://www.gov.uk/government/case-studies/asset-based-community-development-in-northumberland>, diakses 26 Februari 2022.

Dalam upaya melakukan perkembangan masyarakat, Tim Kesehatan Masyarakat DPD Northumberland berupaya menanamkan hubungan positif dan penerimaan diri terhadap setiap individu. Terdapat tiga sumber daya yang dimanfaatkan, yakni sumber daya alam, manusia, dan tempat.<sup>49</sup> Pemanfaatan ketiga aset ini berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang kesehatan, sosialisasi mengenai tata cara hidup yang sehat hingga pengedukasian masyarakat untuk menghasilkan keuntungan melalui investasi sosial. Salah satu program yang terlaksana adalah 'World Cafe' dimana acara tersebut mengadakan diskusi antara tim dengan masyarakat mengenai permasalahan kesehatan. Masyarakat bekerja sama secara aktif dengan tim kesehatan melalui konsep pengembangan hibah mikro. Konsep ini memiliki prinsip kegiatan dilaksanakan secara sederhana dan accessible untuk seluruh masyarakat. Dengan prinsip tersebut, baik individu maupun kelompok diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan pendanaan suatu usaha atau kegiatan.

Dana hibah yang terbatas dicairkan secara berangsur dalam rangka menghindari kemungkinan adanya proyek terbengkalai atau administrasi dan akuntabilitas proyek yang tidak dikelola dengan baik. Pemberdayaan masyarakat dengan metode ABCD berhasil memberikan dampak positif dan meningkatkan kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Northumberland. Dalam waktu tiga tahun, terdapat lebih dari 75 proyek yang berjalan pada tiga wilayah dengan melibatkan lebih dari 1000 pekerja.<sup>50</sup> Adapun beberapa contoh UMKM yang berhasil diciptakan melalui program ini adalah Prior Park Resident Groups yang bergerak di bidang penyewaan kamar serta Beadnell Skiff Building Project yang menciptakan usaha perahu kecil. Dampak positif lainnya berupa sense of belonging yang terus tumbuh sehingga timbul kepekaan dan inisiatif masyarakat dalam memanfaatkan

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> Ibid.

sumber daya dan lingkungan sosial untuk meningkatkan pendapatannya.

Tim Kesehatan Masyarakat DPD Northumberland berhasil meningkatkan kualitas SDM dengan menciptakan masyarakat yang percaya diri, terampil, inisiatif, serta memiliki kesehatan yang baik. Peningkatan kualitas SDM ini berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat binaan ABCD dalam mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang memberikan keuntungan ekonomi. Setelah program ABCD Tim Kesehatan Masyarakat DPD Northumberland berhasil berjalan dengan baik, terdapat beberapa evaluasi untuk pelaksanaan ABCD selanjutnya. Adapun evaluasi tersebut lebih berfokus terhadap komunitas yang berbasis lokal, mendorong mobilitas pembangunan aset untuk masyarakat, dan meningkatkan jaringan kemitraan antara komunitas masyarakat.

Dampak positif dirasakan secara nyata oleh masyarakat Northumberland terkhususnya dalam bidang perekonomian. Oleh karena manfaat dari hubungan positif yang berhasil dibangun antara Tim Kesehatan Masyarakat DPD Northumberland dengan masyarakatnya, ABCD menjadi metode yang ideal untuk diadopsi dalam rangka upaya pembangkitan UMKM terlebih lagi ada kesamaan permasalahan dan kemiripan unsur pendukung antara UMKM masyarakat Northumberland dengan UMKM masyarakat Indonesia. Adapun unsur pendukung dalam masyarakat Indonesia adalah implementasi nilai Pancasila yang tinggi, seperti gotong royong, rasa senasib sepenanggungan, dan kebersamaan dalam usaha pemulihan UMKM.

### **ABCD sebagai First Aid Kit UMKM untuk Beradaptasi dalam Pandemi COVID-19**

Menurut data KemenKopUKM tahun 2018, UMKM memiliki kedudukan krusial atas kontribusinya dalam PDB negara sebesar 61,1% dan usaha penyerapan tenaga kerja

sebesar 117 juta pekerja.<sup>51</sup> Akan tetapi, UMKM juga yang paling terdampak oleh resesi ekonomi dalam pandemi karena banyaknya masyarakat mengurangi sifat konsumerisme.<sup>52</sup> Ini menjadi penyulut naiknya rasio pengangguran selama pandemi karena sulitnya kemampuan masyarakat untuk beradaptasi pada bidang ilmu baru. Padahal, Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan pemerintah dan masyarakat harus mengupayakan kesempatan kerja bersama-sama.<sup>53</sup> Kondisi krisis seperti ini menjadi roda penggerak untuk memberlakukan pemberdayaan masyarakat yang kerap dilakukan oleh pihak ketiga selain pemerintah. Pemberdayaan masyarakat atau komunitas sendiri memiliki beragam bentuk tetapi kajian ini akan lebih mendalami pengembangan masyarakat berbasis aset atau lebih dikenal ABCD.

Menurut Yuli Choirul (2021) dalam penelitiannya akan pemberlakuan ABCD di desa Sambiroto, ABCD berhasil membangkitkan omzet penjualan UMKM karena adanya restrukturisasi akan potensi yang dimiliki dan bagaimana masyarakat gigih mengembangkan potensi tersebut.<sup>54</sup> Berangkat dari gerakan ini, ABCD terbukti menjadi solusi efektif dalam membangkitkan perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan ABCD berfokus pada cara pandang baru yang holistik seperti mengapresiasi gelas setengah penuh dibanding terus mengisi gelas tersebut tanpa menggunakannya.<sup>55</sup> Program ABCD untuk UMKM pasca covid ini lebih

---

<sup>51</sup> Dedy Sasongko, "UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit," *Kemenkeu.Go.Id*, 2020, dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, diakses 17 Februari 2022.

<sup>52</sup> Nova Yanti, "Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 6.

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 39*, n.d.

<sup>54</sup> Yuli Choirul, "Meningkatkan Ekonomi UMKM Melalui Media Sosial Di Era Pandemi COVID-19," *Jurnal Bimbingan Swadaya Masyarakat* 1, no. 3 (2021).

<sup>55</sup> Christoper Derau, *Pembaru Dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013).

menitikberatkan pada sumber daya manusia itu sendiri untuk mengelola kekayaan yang sudah ada sehingga terbentuk kemandirian untuk mengembangkan usahanya, bahkan setelah program berakhir.<sup>56</sup>

ABCD bukanlah hal baru mengingat banyaknya pihak baik pemerintah maupun non-pemerintahan yang menginisiasikan hal ini untuk memperkuat potensi masyarakat. Program ABCD yang telah digarap pemerintah berupa sosialisasi edukasi dan rembug masyarakat kegiatan padat karya infrastruktur berbasis sumber daya lokal. Program ini dinaungi oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi di Kabupaten Buleleng tahun 2016 dengan target betonisasi jalan untuk memperbaiki badan jalan desa sehingga mempercepat alur distribusi hasil bumi.<sup>57</sup> Hal serupa juga dilakukan di daerah Nusa Tenggara Barat tahun 2017 untuk pembukaan jalan baru di Dusun Kwang We, Lotim sehingga perekonomian jual-beli semakin mudah diakses dan penggalakan nilai Pancasila dalam masyarakat seperti kebersamaan dan gotong royong.<sup>58</sup> Lembaga non-pemerintahan juga turut berkontribusi tercermin dalam usaha Yayasan Mitra Tani Mandiri (YTTM) di desa Tniumanu Kabupaten Malaka tahun 2018 dengan dukungan Caritas, Australia yang mengadakan kampanye asset mapping dan proses penerapan ABCD dengan fokus utama menurunkan

---

<sup>56</sup> Handayani, "Pendampingan Pembuatan Pakan Ternak Dari Limbah Pembungkus Lontong Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya," *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020): 555.

<sup>57</sup> Admin Disnaker, "Edukasi Dan Rembug Masyarakat Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Di Desa Pegayaman," [bulelegkap.go.id](https://bulelegkap.go.id), 2021, dalam [https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita\\_instansi/edukasidan-rembug-masyarakat-kegiatan-padat-karya-infrastruktur-di-desapegayaman-71](https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita_instansi/edukasidan-rembug-masyarakat-kegiatan-padat-karya-infrastruktur-di-desapegayaman-71), diakses 17 Februari 2022.

<sup>58</sup> Disnakertrans NTB, "Rembug Masyarakat Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal," [bulelegkap.go.id](https://bulelegkap.go.id), 2021, dalam <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/rembug-masyarakat-kegiatan-padat-karya-infrastruktur-berbasis-sumber-daya-lokal/>, diakses 17 Februari 2022.

rasio buta huruf sehingga masyarakat dapat menggali informasi untuk memulai usaha.<sup>59</sup>

Sekalipun sudah banyak implementasi ABCD, namun belum banyak yang bergerak untuk mengimplementasikan ABCD secara spesifik sebagai usaha pengembangan UMKM pasca COVID-19 di Indonesia. Padahal, UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 38 ayat (2) mengatakan koordinasi pemberdayaan UMKM dilaksanakan secara nasional dan daerah dengan meliputi pengintegrasian kebijakan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi termasuk kemitraan dan pembiayaan UMKM.<sup>60</sup> Oleh karena itu, penulis memperdalam ABCD sebagai pembangkit ekonomi pasca COVID-19 dengan membagi ke beberapa tahapan sehingga parameter keberhasilannya menjadi terukur.

Program ini berlandaskan PermenKopUKM RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memaparkan terkait klasifikasi UMKM secara detail, peran masyarakat dan pemerintah dalam dunia usaha, dan hal lain terkait penyelenggaraan UMKM.<sup>61</sup> Dengan harapan, pemerintah daerah mampu membuat regulasi yang lebih spesifik berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing sehingga pelaksana ABCD atau fasilitator menjadi tanggung jawab pemda. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022,

---

<sup>59</sup> Mitra Tani Mandiri, "Pelatihan Dan Penerapan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset," [mitratanimandiri.org](http://mitratanimandiri.org), 2021, dalam <http://mitratanimandiri.org/pelatihan-danpenerapan-pendekatan-pengembangan-masyarakat-berbasis-aset/>, diakses 17 Februari 2022.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 38*, n.d.

<sup>61</sup> Indonesia and Menteri Koperasi, *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Nomor PM 3 Tahun 2021 Pasal 11 – 41*, n.d.

program ini juga akan mendapat dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (APBN) negara yang ditransfer ke pemda berupa dana desa.<sup>62</sup> Dengan ini, KemenKopUKM, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah terintegrasi sebagai mitra ABCD untuk UMKM.

Tahap ABCD sendiri akan berfokus memahami kemampuan dan pola pikir yang semula terlena dengan apa yang tidak dimiliki menjadi aset potensial apa yang dapat dikembangkan. Pembaharuan pola pikir ini bertajuk 5D of change: discovery, dream, design, define, and destiny. Tahap discovery bertujuan menemukan kembali potensi aset masyarakat yang tidak pernah disadari sebelumnya. Tahap ini berupa workshop asset mapping yang akan melibatkan asosiasi UMKM setempat, dan publik yang berminat. Asset mapping sendiri akan berfungsi meningkatkan keikutsertaan publik dalam mengidentifikasi dan memetakan kemampuan komunitasnya.<sup>63</sup> Dalam workshop asset mapping, peserta akan dibagi ke beberapa kelompok untuk transfer knowledge sehingga menggali pengetahuan baru mengenai pengembangan UMKM. Selanjutnya tahap dream dimana setelah menyadari, masyarakat diajak mencatat posibilitas jika potensi tersebut dikembangkan. Pada tahapan ini akan dilakukan assesment strength, weakness, opportunities, thread (SWOT) bisnis bagi pelaku UMKM. SWOT sendiri bermanfaat untuk keberlanjutan bisnis, menyesuaikan perkembangan pasar, memperluas jaringan pasar sehingga mengetahui kebutuhan pelanggan.<sup>64</sup> Setelah memahami SWOT, pelaku UMKM akan diajak untuk mengisi assesment terkait analisisnya sebelum berlanjut ke

---

<sup>62</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2021, LN No. 245 Tahun 2021, TLN No. 6753*, n.d.

<sup>63</sup> Nadhir Salahuddin, *Panduan KKN ABCD Uin Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: LP2M UIN SUNAN AMPEL, 2015), 52.

<sup>64</sup> Dewi Urip, "Pentingnya Analisis SWOT Dan Kegunaannya Bagi Pelaku UMKM Di Masa COVID-19," *Neo-Demokrasi.Com*, 2021, dalam <https://www.neo-demokrasi.com/pentingnya-analisis-swot-dan-kegunaannya-bagi-pelaku-umkm-di-masa-covid-19/>, diakses 18 Februari 2022.

tahap design. Dengan assessment evaluasi ini, akan timbul hubungan positif antara fasilitator dengan masyarakat binaan.

Tahap design, perincian akan rencana untuk pengembangan potensi tersebut. Tahap ini sebagai kelanjutan dari peserta yang sudah memahami SWOT analisis pasarnya dengan merombak permodalan dana dan modal pendukung lainnya. Pendanaan berupa pembukuan arus kas yang masih manual akan diganti menjadi pembukuan dengan aplikasi digital, seperti BukuKas, CrediBook atau aplikasi lainnya. Menteri KopUKM, Teten Masduki, mendukung gerakan pembukuan digital ini agar nantinya mempermudah background checking sebuah UMKM jika ingin terintegrasi dengan pinjaman oleh lembaga pembiayaan formal baik perbankan maupun koperasi.<sup>65</sup> Selain dana, permodalan kreativitas juga penting agar produk laku di pasaran. Kreativitas memunculkan inovasi dari sumber daya dan mengekstentifikasi peluang yang selama ini tidak disadari.<sup>66</sup> Fasilitator akan mengajarkan basic skill foto produk agar menarik pelanggan melalui aplikasi edit foto yang user-friendly, seperti PicsArt dan PhotoRoom. Selain itu, akan dilakukan pembinaan untuk pelaku UMKM memberi pelayanan yang unggul bagi pelanggan. Hal ini akan menciptakan pengalaman mengesankan bagi pelanggan. Di akhir tahap ini, fasilitator akan melakukan simulasi mandiri pembukuan digital dan photo editing sehingga pelaku UMKM yang berhasil mensimulasikan akan berlanjut ke tahap define.

Tahap define yaitu menentukan perluasan target pemasaran dengan media e-commerce karena digitalisasi usaha ini berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara

---

<sup>65</sup> Tira Santia, "Koperasi Dan UMKM Diminta Terapkan Pembukuan Digital Biar Dilirik Pemberi Pembiayaan," *Liputan6.Com*, 2020, dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4300526/koperasi-dan-umkm-diminta-terapkan-pembukuan-digital-biar-dilirik-pemberi-pembiayaan>, diakses 19 Februari 2022.

<sup>66</sup> Wawan Mas, *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi Dan Politik Akibat Covid-19* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020), 177.

ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara 2025 sebesar 1.738 Triliun.<sup>67</sup> Digitalisasi usaha ini juga sangat menjanjikan dengan mekanisme pasar yang transparan, tumbuhnya kepuasan konsumen dengan sistem pemeringkatan, dan kemudahan konsumen untuk mengkomparasi produk.<sup>68</sup> Terutama dengan hadirnya COVID-19 yang telah mengubah tatanan hidup menjadi serba daring atau digital economic system. Kendati demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum menyesuaikan zaman sehingga pendistribusian barang masih bersifat konservatif. Padahal, Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) membuktikan pengguna internet di Indonesia mencapai 196 juta atau 7,37% populasi dan untuk menyalip desa 3T, Internet Service Provider (ISP) bersama (Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) meluncurkan teknologi satelit (V-sat) untuk menembus perbukitan.<sup>69</sup> Hal ini sebagai bukti dukungan pemerintah dalam digitalisasi usaha. Untuk mendukung usaha tersebut, fasilitator akan mengajarkan sistem pemasaran di ecommerce bagi pelaku UMKM yang diikuti dengan gerakan literasi digital untuk menjangkau digital market.

Tahap akhir yaitu destiny berarti pelaku mampu mempertahankan digitalisasi usaha yang diajarkan. Parameternya berupa mampu melakukan verifikasi kelengkapan data usaha dan memasukkan detail produk untuk menjangkau pelanggan. Foto produk dan pelayanan unggul dalam poin permodalan juga turut berkontribusi dalam tahap ini

---

<sup>67</sup> Kominfo, "Pemerintah Dorong UMKM Maksimalkan Potensi Digitalisasi," *Kominfo.Go.Id*, 2021, dalam <https://www.kominfo.go.id/content/detail/37795/pemerintah-dorong-umkm-perempuan-maksimalkan-potensi-lewat-digitalisasi-dan-sertifikasi-halal/0/berita>, diakses 19 Februari 2022.

<sup>68</sup> Wawan Mas, *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi Dan Politik Akibat Covid-19*, 181.

<sup>69</sup> APJII, "Peluang Penetrasi Internet Dan Tantangan Regulasi Daerah," *apii.or.id*, 2022, dalam <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI79Januari20211>, diakses 19 Februari 2022.

karena pelanggan yang puas akan memberi testimoni bagi marketplace. Testimoni atau mouth to mouth marketing system ini yang nantinya menjaga keberlanjutan UMKM karena testimoni berhasil mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli hingga 86,9%.<sup>70</sup>

## **Penutup**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan kehidupan rakyat merupakan kewajiban negara yang harus direalisasikan terutama pada kondisi perekonomian negara yang saat ini mengalami penurunan sebagai dampak pandemi COVID19. Untuk itu, perlu pengembangan kembali UMKM selaku penyumbang PDB terbesar di Indonesia yang mengalami penurunan pendapatan selama pandemi. Pemberdayaan UMKM tersebut harus didasari kesadaran potensi aset dalam masyarakat dengan melakukan pendekatan langsung untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan, serta potensi yang dimiliki. Salah satu upaya yang tepat untuk diterapkan secara langsung kepada masyarakat adalah mengadakan pendekatan melalui Asset Based Community Development. Pemanfaatan kekayaan sumber daya yang dimiliki masyarakat perlu dikembangkan untuk memajukan kualitas masyarakat serta meningkatkan taraf hidupnya melalui program-program yang sesuai dengan kondisi, kebutuhan, serta potensi dalam diri masyarakat itu sendiri. ABCD tidak hanya berperan untuk menggali kekayaan atau aset yang dimiliki oleh masyarakat, tetapi juga mengembangkan perspektif serta meningkatkan kualitas potensi diri masyarakat dalam jangka panjang. Pemerintah selaku fasilitator diharapkan dapat melakukan pengembangan ini secara merata dengan memprioritaskan masyarakat. Terlebih lagi karena pengembangan UMKM melalui ABCD memberikan dampak positif terhadap masyarakat lokal yang masih memiliki jiwa kebersamaan yang

---

<sup>70</sup> Laily Muzdalifah, "Pengaruh Testimoni Terhadap Keputusan Pembeli," *Greenomika* 2, no. 2 (2020): 110.

tinggi. Akan tetapi, upaya pengembangan UMKM kedepannya tetap memerlukan pengkajian atas evaluasi dari program sebelumnya yang pernah berjalan untuk melahirkan hasil yang lebih optimal.

## Daftar Pustaka

- Abubaka, Muhammad, and Rusydi Abubakar. "Efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro Di Masa Pandemi COVID-19 Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2020." *Jurnal Transparansi Publik* 1, no. 1 (2021).
- Admin Disnaker. "Edukasi Dan Rembug Masyarakat Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Di Desa Pegayaman." [bulelengkab.go.id](https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita_instansi/edukasidan-rembug-masyarakat-kegiatan-padat-karya-infrastruktur-di-desapegayaman-71), 2021. dalam [https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita\\_instansi/edukasidan-rembug-masyarakat-kegiatan-padat-karya-infrastruktur-di-desapegayaman-71](https://disnaker.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita_instansi/edukasidan-rembug-masyarakat-kegiatan-padat-karya-infrastruktur-di-desapegayaman-71), (17 Februari 2022).
- APJII. "Peluang Penetrasi Internet Dan Tantangan Regulasi Daerah." [apjii.or.id](https://apjii.or.id), 2022. dalam <https://apjii.or.id/downfile/file/BULETINAPJIIEDISI79> Januari 2021, (19 Februari 2022).
- Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021.
- BPS. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Desember 2021." *Berita Resmi Statistik*. 2021, (16 Februari 2022).
- Christopher Derau. *Pembaru Dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan. Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) Phase II*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

COVID-19, Tim Komunikasi Komite Penanganan, and Pemulihan Ekonomi Nasional. “Program PEN Bangkitkan Geliat UMKM Di Masa Pandemi.” *Covid19.Go.Id*, 2021. dalam <https://covid19.go.id/berita/program-pen-bangkitkan-geliat-umkm-di-masapandemi>, (21 Februari 2022).

Dedy Sasongko. “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit.” *Kemenkeu.Go.Id*, 2020. dalam <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, (17 Februari 2022).

Dewi Urip. “Pentingnya Analisis SWOT Dan Kegunaannya Bagi Pelaku UMKM Di Masa COVID-19.” *Neo-Demokrasi.Com*, 2021. dalam <https://www.neo-demokrasi.com/pentingnya-analisis-swot-dan-kegunaannya-bagi-pelaku-umkm-di-masa-covid-19/>, (18 Februari 2022).

Disnakertrans NTB. “Rembug Masyarakat Kegiatan Padat Karya Infrastruktur Berbasis Sumber Daya Lokal.” [bulelegkap.go.id](https://disnakertrans.ntbprov.go.id/rembug-masyarakat-kegiatan-padatkarya-infrastruktur-berbasis-sumber-daya-lokal/), 2021. dalam <https://disnakertrans.ntbprov.go.id/rembug-masyarakat-kegiatan-padatkarya-infrastruktur-berbasis-sumber-daya-lokal/>, (17 Februari 2022).

Government Uk. “Asset-Based Community Development in Northumberland.” *Www.Gov.Uk*, 2018. dalam <https://www.gov.uk/government/case-studies/asset-based-community-development-in-northumberland>, (26 Februari 2022).

Handayani. “Pendampingan Pembuatan Pakan Ternak Dari Limbah Pembungkus Lontong Untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Kupang Krajan Kecamatan Sawahan Kota Surabaya.” *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2020).

Hapsari, Pradnya Paramita, Abdul Hakim, and Saleh Soeaidy.

“Pengaruh Pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Di Pemerintah Kota Batu).” *Wacana* 17, no. 2 (2014).

Harjowiryo, Marwanto, and Windraty Ariane Siallagan. “Studi Kasus Intervensi Pemerintah Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi COVID-19.” *Indonesian Treasury Review* 6, no. 3 (2021).

Indonesia. *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1*, n.d.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2021, LN No. 245 Tahun 2021, TLN No. 6753*, n.d.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 39*, n.d.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 38*, n.d.

Indonesia. *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Pasal 2 – 38.*, n.d.

Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik. “Optimalisasi Pemanfaatan Anggaran Program PEN Untuk Mendorong Akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional.” *Ekon.Go.Id*, 2021. dalam <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3400/optimalisasi-pemanfaatan-anggaran-program-pen-untuk-mendorong-akselerasi-pemulihan-ekonominasional>, (21 Februari 2022).

Indonesia Menteri Koperasi. *Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah*

*Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Nomor PM 3 Tahun 2021 Pasal 11 – 41, n.d.*

Indonesia, Negara Republik. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C, n.d.*

International Association for Community Development (IACD). “What Are Asset-Based Approaches to Community Development?” [ubc.ca](https://cs1.ubc.ca/files/2010/04/What-Are-Asset-Based-Approaches-to-Community-Development), 2021. dalam <https://cs1.ubc.ca/files/2010/04/What-Are-Asset-Based-Approaches-to-Community-Development>, (21 Februari 2022).

Isbandi Rukminto Adi. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Iswari, Lenti, and Muharir. “Pengaruh COVID19 Terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *JIMESHA: Jurnal Ilmu Mahasiswa Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2021).

Jim Ife. *Community Development in An Uncertain World*. Sydney: Cambridge University Press, 2013.

Kata Data Insight Center. “Digitalisasi UMKM Di Tengah Pandemi COVID19.” [katadata.go.id](https://katadata.co.id/umkm), 2020. dalam <https://katadata.co.id/umkm>, (27 Februari 2022).

Kemenkeu RI. “Banpres Produktif Resmi Diluncurkan Untuk Pelaku Usaha Mikro.” [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/banpresproduktif-resmi-diluncurkan-untuk-pelaku-usaha-mikro), 2020. dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/banpresproduktif-resmi-diluncurkan-untuk-pelaku-usaha-mikro>, (21 Februari 2022).

Kemenkeu RI. “Keefektivitasan Program PEN Masih Diragukan, Apa Solusinya?” *Kemenkeu.Go.Id*, 2020. dalam <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/biak/id/data->

publikasi/artikel/2932-tes.html, (21 Februari 2022).

Kemenkeu RI. “Program Pemulihan Ekonomi Nasional.”  
Kemenkeu.go.id, 2020. dalam  
<https://www.kemenkeu.go.id/media/15149/program-pemulihan-ekonominasional>, (21 Februari 2022).

Kemenko Perekonomian. “Optimalisasi Produktivitas UMKM Melalui Go-Digital Dan Go-Legal.” *Ekon.Go.Id*, 2021. dalam  
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3016/optimalisasi-produktivitas-umkm-melalui-go-digital-dan-go-legal>, (21 Februari 2022).

Kementerian Investasi. “Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia.”  
bkpm.go.id, 2022. dalam  
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upayapemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, (21 Februari 2022).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *APBN KITA: Kinerja Dan Fakta*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Ini Sederet Upaya Pemerintah Memajukan UMKM.”  
Kemenkeu.go.id, 2021.  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-sederet-upaya-pemerintahmemajukan-umkm/>, (21 Februari 2022).

Kominfo. “Pemerintah Dorong UMKM Maksimalkan Potensi Digitalisasi.”  
*Kominfo.Go.Id*, 2021. dalam  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37795/pemerintah-dorong-umkm-perempuan-maksimalkan-potensi-lewat-digitalisasi-dan-sertifikasi-halal/0/berita>, (19 Februari 2022).

Kurniawati, Dwi Pratiwi, Bambang Supriyono, and Imam Hanafi. “Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto).”  
*Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1, no. 4 (2013).

- Laily Muzdalifah. “Pengaruh Testimoni Terhadap Keputusan Pembeli.” *Greenomika* 2, no. 2 (2020).
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. “Survei Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Ekonomi Rumah Tangga Indonesia.” dalam *Lipi.Go.Id*, 2020. <http://lipi.go.id/siaranpress/survei-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-ekonomi-rumah-tangga-indonesia/22123>, (21 Februari 2022).
- Mirza Maulana. “Asset Based Community Development: Strategi Pengembangan Masyarakat Di Desa Wisata Ledok Sambi Kaliurang.” *Pengembangan Masyarakat Islam* 4, no. 2 (2019).
- Mitra Tani Mandiri. “Pelatihan Dan Penerapan Pengembangan Masyarakat Berbasis Aset.” [mitratanimandiri.org](http://mitratanimandiri.org), 2021. dalam <http://mitratanimandiri.org/pelatihan-danpenerapan-pendekatan-pengembangan-masyarakat-berbasis-aset/>, (17 Februari 2022).
- Munawar Noor. “Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2011).
- Nadhir Salahuddin. *Panduan KKN ABCD Uin Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: LP2M UIN SUNAN AMPEL, 2015.
- Negara Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2)*, n.d.
- Nova Yanti. “Covid-19 Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- Nugraha, Budi. “Enam Program Strategis Umkm Segera Diimplementasikan.” *Suaramerdeka.Com*, 2019. dalam <https://www.suaramerdeka.com/ekonomi/pr-04119115/enam-program-strategis-umkm-segera-diimplementasikan>, (21 Februari 2022).

PEREKONOMIAN, KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG, and REPUBLIK INDONESIA. “UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia.” *Ekon.Go.Id*, 2021. dalam <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, (21 Februari 2022).

Perserikatan Bangsa-Bangsa. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR 993*, 1996.

Riska Carolina. “Hak Asasi Manusia: Sejarah Dan Prinsip.” [eslam.or.id](https://eslam.or.id), 2019. dalam <https://asasi.elsam.or.id/hak-asasi-manusia-sejarah-dan-prinsip/>, (30 November 2022).

Sarfiah, Sudati Nur, Hanung Eka Atmaja, and Dian Marlina Verawati. “UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa.” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 2 (2019).

Savitri, Anava Salsa Nur, Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa, and Yusvita Nena Arinta. “Dampak Dan Strategi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Masa Pandemi Dan Era New Normal.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 7 (2020).

Simon J V Silaen. “Penerapan Prinsip-Prinsip Community Development Dalam Pelaksanaan Program Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera Di Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.” Medan, 2016.

Supriyanto. “Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan.” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 3, no. 1 (2006).

Teguh Iman Harry Tjahyadi. *Pemantauan Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Untuk UMKM Di PNM Mekar*. Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan, 2021.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Program PEN Sektor Infrastruktur Serap 1,2 Juta Tenaga Kerja Hingga Pelosok Desa.” *Covid19.Go.Id*, 2021. dalam <https://covid19.go.id/p/pemulihan-ekonomi-nasional/program-pen-sektor-infrastruktur-serap-12-juta-tenaga-kerja-hingga-pelosok-desa>, (21 Februari 2022).

Tira Santia. “Koperasi Dan UMKM Diminta Terapkan Pembukuan Digital Biar Dilirik Pemberi Pembiayaan.” *Liputan6.Com*, 2020. dalam <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4300526/koperasi-dan-umkm-diminta-terapkan-pembukuan-digital-biar-dilirik-pemberi-pembiayaan>, (19 Februari 2022).

UI, LPEM FEB, and UNDP Indonesia. *Report Impact of COVID-19 Pandemic on MSMEs in Indonesia*. Jakarta: LPEM FEB UI dan UNDP Indonesia, 2020.

Wahyono. “Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia.” *ham.go.id*, 2016. dalam <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>, (30 November 2022).

Wawan Mas. *New Normal: Perubahan Sosial Ekonomi Dan Politik Akibat Covid-19*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.

Yuli Choirul. “Meningkatkan Ekonomi UMKM Melalui Media Sosial Di Era Pandemi COVID-19.” *Jurnal Bimbingan Swadaya Masyarakat* 1, no. 3 (2021).

Zubaedi. *Pengembangan Masyarakat: Wacana Dan Kritik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.